



2013 masih tahun korupsi PBJ

# DARURAT PENGADAAN BARANG DAN JASA

# CATATAN KORUPSI SEMESTER II TAHUN 2013

- ✘ Dari 267 kasus korupsi 42,70% merupakan kasus Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ)
- ✘ Pejabat/ pegawai Pemda merupakan aktor utama korupsi
- ✘ Dari pegawai pemda tersebut 39,03% nya merupakan PPK, dan PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan)

A 3D illustration of three white humanoid figures on a dark surface against a wood-grain background. One figure on the left is holding a red megaphone and shouting towards two other figures on the right who appear to be listening or talking to each other.

E Procurement

Partisipasi masyarakat di 3 daerah

**MENDORONG PUBLIK BERANI  
MENGAWASI E-PROCUREMENT**

# MENDORONG OMS DI DAERAH BERANI

- ✘ Melakukan pemantauan pelaksanaan e-procurement di 3 daerah: Kota Denpasar, Kota Banda Aceh, Kota dan Kabupaten Blitar
- ✘ Pemantauan dilakukan terhadap implementasi e-procurement dengan bantuan tools opentender.net
- ✘ Opentender.net merupakan tools pemantuan implementasi e-procurement berbasis web
- ✘ Keberadaan tools opentender.net dimungkinkan karena ada MoU antara ICW dan LKPP
- ✘ LKPP melakukan sharing data dari LPSE di seluruh Indonesia ke dalam opentender.net

# PERKEMBANGAN PELAKSANAAN E-PROCUREMENT

No.	Deskripsi	2011	2012	2013	Total
1.	Jumlah Lelang	24.475	91.356	130.110	254.095
2.	Nilai Pagu (Juta Rp)	53.286.540	151.286.703	231.019.810	452.442.341
3.	Jumlah Lelang Selesai	24.076	88.308	119.008	239.515
4.	Nilai Pagu Selesai (Juta Rp)	38.163.399	145.724.645	202.294.749	402.335.088
5.	Nilai Hasil Lelang (Juta Rp)	33.688.791	128.965.440	181.981.073	358.875.379
6.	Selisih Pagu dan Hasil Lelang (Juta Rp)	4.474.608	16.759.205	20.313.675	43.459.710
7.	Selisih Pagu dan Hasil Lelang (%)	11,72	11,50	10,04	10,80
8.	Jumlah PPK	1.947	4.696	23.605	32.453
9.	Jumlah Panitia	22.056	46.386	47.638	121.783
10.	Jumlah Penyedia Terdaftar	118.523	103.126	40.864	318.369
11.	Jumlah Penyedia Terverifikasi	81.410	67.770	26.054	219.491
12.	Jumlah Penyedia tertolak	306	549	102	1.092
13.	Jumlah Penyedia Terblacklist	17	135	100	264

# TOOLS...

opentender.net

☆ ▼ ↻ 🔍 measurement temple

## OPENTENDER.NET

tender terbuka mencegah korupsi

Home Berita Database Analisis Top 10 Profil Kontak

### 5 Kontrak EPROC - Propinsi

Potensi Res ▼

NO.	NAMA PROYEK	PERUSAHAAN	PERGUMUMAN	MILAI KONTRAK	KONTRAK : HPS	T/P	SKOR
1.	Pengadaan Alat Kedokteran dan Kesehatan RSUD Dr. Hasan Gallih Banting Tahun Anggaran 2012	- (B1399)	1 Oct 2012	34.890.273.000	100%	0/0	20
2.	Pengadaan Alat LAB dan Peralatan Penunjang Pendidikan FMIPA dan FTK (APB K-P) Universitas Pendidikan Ganesha Tahun Anggaran 2012	- (B1399)	24 Oct 2012	27.562.789.000	99%	5/5	20
3.	Pengadaan Konstruksi Jalan Pakel Peningkatan Jalan Lenanguar-Lanyuk (8,0 Km) (Tahun Jawab)	- (B1399)	1 Nov 2012	19.945.625.000	100%	3/3	20
4.	Alat Kedokteran, Kesehatan dan ICB	- (B1399)	15 Oct 2012	14.745.875.000	99%	0/0	20
5.	Pembangunan Fasilitas Dasar Pelabuhan Laut Tanjung Api Api	- (B1399)	28 Dec 2012	13.517.869.000	100%	3/3	20

### Ringkasan Tender 2012 di tingkat Propinsi

- Σ Kontrak Rp. 38.220.815.492.520
- × Kontrak Rp. 1.348.747.812
- × Pagu Rp. 1.531.735.522
- Σ Paket 28.338 paket
- Σ Pemenang 11.197 perusahaan
- × Peserta 7 peserta
- × Triwulan ke-2

Database Analisis

### Nilai Kontrak

Nilai Kontrak	Jumlah Paket
24%	~7.5k
85%	~10.5k
17%	~5.5k
11%	~1.5k

### Paket/Sumber Dana

Persentase / Miliar: 1 N

- Lainnya: 0 N
- BMN: 0 N
- MD: 0 N
- D: 1 N
- 14 N

### Penawaran/Paket

> 10 : 4 N

- 7-10 : 4 N
- 4-6 : 5 N
- 1-3 : 5 N
- 1 : 0 N

# OPENTENDER.NET DAN PEMDA

- ✘ OMS diberi training menggunakan tools
- ✘ Tools juga ditawarkan kepada inspektorat ataupun pemerintah daerah untuk menggunakan
- ✘ OMS juga dibekali teknik investigasi terhadap dugaan korupsi yang ada di sektor pengadaan barang dan jasa dari hasil pemantauan menggunakan tools

# KRITERIA PEMANTAUAN #1

## **Nilai kontrak relatif besar**

Pada umumnya nilai pengadaan atau kontrak pekerjaan yang besar akan banyak menarik minat peserta tender karena menjanjikan keuntungan yang besar pula. Keuntungan inilah yang biasanya membuat peserta tender berusaha melakukan apapun termasuk pelanggaran hukum.

Oleh karena itu penting mengawasi proyek-proyek yang nilai pengadaan sangat besar. Ukuran besarnya proyek tentu sangat subyektif, untuk memudahkannya pada saat analisis maka bisa dibantu dengan menggunakan skala. Misalnya nilai pengadaan antara 500 juta – 10 miliar, 10 miliar – 50 miliar dan seterusnya.



# KRITERIA PEMANTAUAN #2

## **Jumlah Peserta tender Sedikit**

Sistem pengadaan elektronik sejatinya menghapus batas-batas teritori sehingga peserta tender dari propinsi/kabupaten/kota mana pun di Indonesia bisa ikut serta. Jika pada suatu tender ternyata pesertanya sedikit, dimonopoli oleh peserta dari satu wilayah atau peserta sama disetiap tender, maka tender elektronik ini patut dicurigai direkayasa atau sistem arisan.

# KRITERIA PEMANTAUAN #3

## **Menang berulang-ulang**

Pada proses pengawasan, pemenang lelang yang selalu menang berkali-kali juga harus diwaspadai. Apakah fenomena tersebut terkait favoritisme panitia karena prestasi atau karena ada relasi keluarga, politik dan bisnis pemenang tender dengan elite politik lokal

# KRITERIA PEMANTAUAN #4

## **Kontrak Proyek Kontruksi di Quarter 4**

Pada prinsipnya siklus anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) dikelola selama masa satu tahun 1 Januari – 31 Desember. Dengan batasan waktu ini maka menjadi tantangan bagi setiap SKPD untuk merencanakan, membelanjakan dan mempertanggungjawabkannya tepat waktu agar serapan anggaran dan pemanfaatannya maksimal.

Jika berdasarkan pemantauan ditemui proyek konstruksi yang nilai kontraknya besar namun ditandatangani pada quarter 4 tahun berjalan, maka besar kemungkinan proyek tersebut hanya rekayasa atau pengerjaan proyeknya tidak optimal karena terbentur oleh akhir siklus anggaran di bulan desember

# KRITERIA PEMANTAUAN #5

## **Saving kecil pada Nilai Kontrak (HPS) mendekati 100 Miliar**

Setiap pelaksanaan pengadaan konvensional maupun elektronik terdapat komponen yang terkait dengan anggaran yang harus diketahui, pertama Anggaran berdasarkan Pagu DIPA APBD/APBN, Anggaran berdasarkan HPS dan Anggaran berdasarkan Kontrak.

Prinsip efisiensi sesuai Perpres 97 tahun 2011 diterapkan dalam setiap pengadaan maka seharusnya nilai kontrak pengadaan juga harus lebih rendah dari nilai HPS maupun Pagu DIPA. Mengapa demikian? Sesuai peraturan PBJ, panitia pengadaan harus membuat HPS yang didasarkan pada harga pasar. Jika ini dilakukan dengan benar maka seharusnya HPS yang didapatkan akan lebih rendah dari Pagu DIPA.

**Nah, nilai kontrak pun seharusnya juga lebih rendah dari Pagu DIPA maupun HPS karena umumnya peserta tender dengan nilai penawaran terendah dan proporsional yang memenangkan kontrak pengadaan. Dengan demikian seharusnya semakin besar nilai kontrak maka semakin besar pula saving/ efisiensi anggaran yang didapatkan.**

# PELUANG PENYIMPANGAN PADA KEGIATAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK

- ✘ Adanya intervensi kepala daerah kepada panitia pengadaan/ ULP
- ✘ Penetapan Owner Estimate (Harga Perkiraan Sendiri) yang telah di gelembungkan
- ✘ Spesifikasi dan Pemaketan yang mengarah pada *bidder* tertentu
- ✘ Kualitas barang rendah
- ✘ Mengatur bandwidth internet untuk mereduksi keterlibatan bidder lain

# KOTA DAN KABUPATEN BLITAR

- ✘ 17 September 2013 tools ini telah dipresentasikan dihadapan perwakilan dari pemkab dan Pemkot Blitar
- ✘ 4-5 September 2013 OMS di Kota Blitar (KRPK) telah diberi pelatihan menggunakan tools ini dan metode investigasi
- ✘ Berdasarkan hasil pemantauan dengan menggunakan tools, OMS di Blitar menemukan paket pengadaan yang memiliki prioritas menyimpang adalah: (1) proyek pembangunan pusat layanan autis di Kota Blitar

# KOTA DAN KABUPATEN BLITAR #2

- ✘ (2) proyek rehabilitasi saluran Jati di kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar dan (3) proyek pemasangan lampu di Stadion Soepriyadi
- ✘ Proses pemantauan di Blitar baru sampai tahap penentuan prioritas paket proyek yang diduga menyimpang. Proses investigasi dugaan pidana korupsinya masih berlangsung. Namun sudah ada indikasi penyimpangan proses lelang

# KOTA BANDA ACEH

---

- ✘ Pada 19 September 2013 tools ini telah ditawarkan kepada pemerintah kota agar dapat dipergunakan sebagai instrumen untuk meminimalisir sekaligus mencegah terjadinya pelanggaran dalam pengadaan barang dan jasa.
- ✘ 28 Oktober 2013 disosialisasikan kembali yang dilaksanakan di Aula Gedung Walikota Banda Aceh dan dibuka oleh Sekda Kota Banda Aceh, Drs. T. Saifuddin TA, M.Si



# KOTA BANDA ACEH #2

---

- ✘ Bersama MaTA Aceh pada tanggal 26-27 Agustus 2013 telah dilakukan pelatihan pemantauan pelaksanaan e-procurement dan investigasi korupsi kepada CSO di Banda Aceh
- ✘ CSO di Banda Aceh menemukan proyek yang memiliki resiko terjadi penyimpangan adalah (1) proyek pelebaran jalan Syiah Kuala (2) proyek pengadaan unit komputer (PC) untuk 4 sekolah
- ✘ Di Banda Aceh hasil pemantauan belum sampai mengarah pada tindak pidana korupsi

# KOTA DENPASAR

---

- ✘ Di Denpasar tools ini sudah dipromosikan kepada pemkot Denpasar. Walikota Denpasar yang baru I.B. Wijaya Mantra cukup mengapresiasi dan cukup kooperatif untuk melakukan kerjasama pemantuan
- ✘ Yayasan Manikaya Kauci mengkoordinir OMS di Denpasar untuk melakukan pemantuan pada proyek PBJ tahun 2010 yang sudah selesai, bahkan sudah muncul tindak pidana korupsi

# KOTA DENPASAR #2

---

- ✘ Paket yang dipantau adalah proyek sound system, lighting dan CCTV di UPT Taman Budaya/Art Centre di bawah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Propinsi Bali dengan total anggaran dari APBD tahun 2010 berjumlah 21 miliar
- ✘ Dalam kasus ini, ditemukan kerugian negara 6 miliar rupiah (*mark up*). Kejati Bali telah menetapkan 2 (dua) tersangka: kepala UPT Taman Budaya/Art Centre (Ketut Mantara Gandi) dan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Ketut Suastika).

# CONTOH SUKSES DARI PROGRAM PEMANTAUAN E-PROCUREMENT

---

- ✘ Pada tahun 2012 pemantauan pelaksanaan e-procurement dilakukan di Kota Makassar, Kabupaten Kebumen, Kabupaten dan Kota Madiun, Kota Tangerang Selatan, Kota Mataram
- ✘ Dengan memanfaatkan tools opentender.net, Lembaga Pemantau Independen (LPI) Kota Makassar berhasil menemukan dugaan markup pengadaan mebelair sekolah (SD, SMP dan SMA di Kota Makassar

# PROSPEK PEMANFAATAN OPENTENDER.NET

- ✘ Tools opentender.net terbukti cukup efektif dalam mengidentifikasi penyimpangan dalam pelaksanaan pengadaan barang secara elektronik
- ✘ Opentender.net bisa dipergunakan sebagai instrumen untuk meminimalisir sekaligus mencegah terjadinya pelanggaran dalam pengadaan barang dan jasa. Baik oleh organisasi masyarakat sipil maupun inspektorat
- ✘ Opentender.net juga bisa dipergunakan untuk membantu mengidentifikasi dugaan tindak pidana korupsi dalam sektor PBJ

# REKOMENDASI PENGGUNAAN

- ✘ Untuk mengungkap adanya tindak pidana korupsi di sektor PBJ, perlu dilakukan investigasi lebih mendalam lagi atas hasil identifikasi dari penggunaan tools [opentender.net](http://opentender.net)
- ✘ Hal ini karena penyimpangan dalam proses lelang lebih bersifat administratif meskipun memiliki potensi munculnya tindak pidana korupsi

# DUGAAN KORUPSI PADA PROYEK PENGADAAN 128 UNIT PC (KOMPUTER) UNTUK 4 SEKOLAH DI BANDA ACEH

- ✘ Diduga terjadi Mark Up harga Komputer yang dilakukan oleh pihak penyusun HPS Disedikpora Kota Banda Aceh. Namun dalam kasus ini tidak sampai kepada merugikan negara karena pihak penyedia yang memenangkan tender (CV. Jiwa Tenang) melakukan penawaran yang lebih rendah dari HPS dan sesuai dengan harga pasar. Persentase HPS nya mencapai 97,61 %.

- 
- ✘ Disdikpora Kota Banda Aceh juga diduga melakukan Mark Up pada penentuan HPS untuk jenis Keuntungan bagi Penyedia, PPh dan PPN, dimana persentasenya melebihi dari yang dianjurkan. Namun karena secara aturan keuntungan bagi Penyedia dimungkinkan sampai 15 persen sehingga strategi tersebut masih dianggap wajar.



# DUGAAN MARKUP PEMASANGAN LAMPU STADION SOEPRIJADI KOTA BLITAR

- ✘ Ada pengaturan pemenang tender
- ✘ Harga penawaran sangat mendekati harga pagu dan waktu pengerjaan yang terlalu pendek.
- ✘ Ada selisih harga satuan sebesar Rp 490.355.200,00 (di pasaran harga lampu stadion Lampu Sorot Metal Halide 2000W Type MVF 403 Arena Vision Philips sebesar Rp 20.000.000,00 tapi dalam laporan ditulis harga per unit lampu setadion sebesar Rp 27.661.800 sehingga ada selisih sebesar Rp 7.661.800,00 x 64 unit lampu = Rp 490.355.200,00 )

- 
- ✘ Ada 8 unit lampu yang belum di pasang sehingga terdapat selisih dana lampu sebesar sebesar Rp 221.294.400,00 (harga lampu per unit Rp 27.661.800,00 x 8 unit).
  - ✘ Dalam Proyek pemasangan lampu stadion Supriyadi Kota Blitar ada indikasi kerugian negara sebesar Rp 711.649.600,00 (Rp 490.355.200,00 + Rp 221.294.400,00).

**TERIMA KASIH**

---